

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEBAGAI MEDIA PENCAPAIAN PENDAPATAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN(WTP) DI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

La Ode Hasiara<sup>1</sup>, Sudarlan<sup>2</sup>, Ahyar Muhammad Diah<sup>2</sup>

*Departemen of Accounting, and Bussines Administration Politeknik Negeri Samarinda*

### ABSTRACT

The objectives to be achieved in this research are to: know and analyze the Standard Operating Procedure (SOP) which is an obligation for regional governments. In ten districts / cities in the province of East Kalimantan, there are eight districts / cities that have obtained Unqualified Opinions (WTP). The method used in this research is descriptive quantitative approach. The results achieved from this study is Unqualified Opinions, the Standard Operating Procedures have been applied by all local Government Organizations in East Kalimantan Province. Conclusions East Kalimantan Province has ten cities/districts, and only three districts that have not yet have unqualified opinion.

Keywords: standard operational procedures, becoming a media, achieving fair opinions

### 1. PENDAHULUAN

Pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang terbaik atas laporan keuangan suatu entitas (Yee, Sujan, James, & Leung, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012, tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian (Nenagara, 2012) serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Selanjutnya (Dewi, 2012) menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. SOP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit pemerintahan. Berdasarkan teori dan fenomena yang tampak dan berpedoman kepada aturan yang berlaku (S. K. N. Astuti, 2017). Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan terkait dengan proses penyelenggaraan aktivitas organisasi pemerintah daerah (Faozan & Wahyuadianto, 2009). Selanjutnya (S. K. N. Astuti, 2017) menyatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. SOP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit pemerintahan. Berdasarkan teori dan kajian empiris di atas, maka pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu telah menyiapkan perangkat kebijakan yaitu penyediaan SOP bagi semua OPD yang ada di provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Entitas yang disampaikan manajemen terhadap laporan keuangan suatu periode akuntansi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)menggunakan norma pemeriksaan sebagai Standar Profesional Pemeriksaan Akuntan Indonesia. Unqualified Opinion (UQO) adalah sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Pemerintah diharuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Dewi, 2012). Pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan, sistem kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Soeradi, Tinangon, & Afandi, 2018a). Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien dari pekerjaan dengan biaya yang paling rendah.

### 2. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau teknik yang dilakukan peneliti untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah (Hasiara, 2018). Alat utama dan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti (A. Chaedar,

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: La Ode Hasiara, Telp. 08124999262, hasiara@polnes.ac.id

2011). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (a) observasi, (b) wawancara, (c) dokumentasi, dan (d) triangulasi (Hasiara, 2012). Observasi dan wawancara dilakukan terkait dengan pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO). SOP disusun dengan tujuan untuk memudahkan dan merapikan serta menertibkan pekerjaan (Subadi, 2008). Sistem ini berisi urutan-urutan proses pelaksanaan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir periode pelaporan. Kebenaran ilmiah diperoleh hanya, jika sang peneliti menggunakan alat yang sama sehingga kebenaran ilmiah yang dicapai dengan berbagai cara atau metoda untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan melalui penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan capaian yang diperoleh dari kegiatan penelitian, dengan menggunakan berbagai metode untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan OPD Balikpapan, OPD Samarinda, OPD Kutai Kartanegara, OPD Paser Tanah Grogot, OPD Sangatta, dan OPD terkait lainnya serta OPD provinsi menjelaskan bahwa:

“tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang, yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam entitas pemerintah daerah (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.

Pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang (Mulyani & Suryawati, 2011) yang diselenggarakan dalam organisasi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan, untuk melindungi sekaligus memudahkan pengawasan (Majampoh, Saerang, & Afandi, 2018a). Selain itu, menjadi bahan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang ada dalam entitas pemerintah (Faozan & Wahyuadianto, 2009). Selain tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana dijelaskan di atas, SOP juga memiliki banyak manfaat. Informan kunci juga menyatakan bahwa SOP memiliki manfaat sebagai berikut:

“fungsi SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk pegawai pemula, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam suatu organisasi pemerintah daerah (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)”.

Berdasarkan ungkapan informan kunci di atas menjelaskan bahwa SOP berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pekerjaan sehari-hari yang ada dalam entitas pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh (S. Astuti, 2018) yang menyatakan bahwa SOP sebagai alur kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dari periode yang satu keperiode berikutnya. Hal yang sama, juga disampaikan (S. K. N. Astuti, 2017) yang menyatakan bahwa SOP berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pekerjaan dalam entitas dipemerintah daerah. Selain SOP memiliki fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, SOP juga memiliki manfaat bagi organisasi pemerintah daerah. Manfaat tersebut disampaikan informan kunci di bawah ini.

“SOP, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, SOP meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, SOP menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pengawasan bagi pegawai, dengan cara yang konkret untuk

memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)".

Ungkapan informan di atas menjelaskan bahwa SOP, sebagai standarisasi yang harus dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari (Mulyani & Suryawati, 2011). Hal ini untuk mengurangi kesalahan (Majampoh et al., 2018a), SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen (Faozan & Wahyuadianto, 2009), sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara informan yang lain juga menjelaskan, tentang manfaat SOP dalam organisasi pemerintah daerah, yang dikemukakan informan kunci di bawah ini.

"SOP dapat menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, yang dapat menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, selain itu SOP juga menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, dan SOP juga membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan pada masyarakat agar tetap berjalan dalam berbagai situasi (wawancara dilakukan 13 Mei, 2019)".

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa kinerja organisasi, jika bekerja dengan sistem tata kelola yang dilakukan efisien dan efektif. Hal ini dapat menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. (Majampoh, Saerang, & Afandi, 2018b), menyatakan bahwa SOP, juga menghindari adanya tumpang tindih suatu pelaksanaan tugas dalam pemberian pelayanan kepada publik. Sehingga (Oemar, 2013) menyatakan pendapat Unqualified Opinion (UQO) merupakan pendapat yang terbaik diantara semua pendapat. Selanjutnya (Istqobudi, 2015) menyatakan laporan keuangan entitas dikatakan baik, entitas tersebut telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang baik (Diani, 2014). Hal ini, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) (Majampoh et al., 2018a) menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dan ini, bukan saja dipemerintah daerah, tetapi semua organisasi, baik organisasi swasta, militer, bahkan pemerintahan saat ini telah menggunakan SOP. Dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan bahwa kualitas organisasi dapat dipastikan menjadi lebih baik, karena seluruh kegiatan kecil, maupun besar melalui mekanisme SOP, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan proses organisasi menjadi sangat kecil.

Organisasi pemerintah daerah sangat membutuhkan SOP, karena dengan adanya SOP, menunjukkan adanya pengawasan bagi OPD yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Pemilikan standarisasi organisasi bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang akan terjadi, selain itu SOP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur dalam pengelolaan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, juga SOP berfungsi untuk mengurangi adanya intervensi manajemen yang berakibat merusak tatanan sebuah organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, informan yang berkifrah dalam bidangnya beberapa tahun dan beliau enggan menyebutkan namanya menjelaskan banyak hal tentang manfaat SOP adalah sebagai berikut:

"digunakan sebagai acuan/standar bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab, sebagai pegawai negeri sipil, selain itu juga meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan tugas sehari-hari, dalam upaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dari hari kehari (wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juni, 2019)".

Pernyataan informan kunci di atas menunjukkan bahwa dengan kunci utama penyelesaian kerja harus merujuk adanya SOP bagi pemerintah daerah, maka dengan adanya SOP bagi pemerintah daerah menjadi bagian dari standarisasi bagi aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari (Faozan & Wahyuadianto, 2009). Hal yang sama juga dikemukakan (Dewi, 2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya SOP bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; selain itu juga mengurangi adanya intervensi manajemen untuk tidak melawati kewenangannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; sehingga dapat membri cara yang lebih konkrit bagi aparatur pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dengan hati yang tulus dan iklas. Selain pernyataan yang disampaikan informan kunci di atas, ada informan yang menjelaskan tentang manfaat SOP bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

"menciptakan ukuran standar kinerja yang dapat mengarahkan aparatur ke arah yang lebih konkrit, untuk memperbaiki kinerja dalam membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, dan memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang

berlangsung dalam berbagai situasi, juga menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, yang mmberi informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya, dan memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur (wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni, 2019)".

Berdasarkan keterangan dari informan kunci di atas, dapat dijelaskan bahwa SOP memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, dengan adanya SOP, daerah dapat menciptakan ukuran standar kinerja yang dapat memberikan aparatur tentang cara yang lebih konkrit, untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan (Demak, Manossoh, & Afandi, 2018). Hal yang sama, juga dijelaskan dengan adanya SOP, maka (Armando, 2013) dapat memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan dapat berlangsung dalam berbagai situasi. (Soeradi, Tinangon, & Afandi, 2018b) juga menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, yang mmberi informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu disampikan (Mulyani & Suryawati, 2011) bahwa dengan adanya SOP, dapat memberikan informasi bagi upaya untuk peningkatan kompetensi aparatur bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Sehingga dengan adanya SOP dapat meminimalisir kesalahan bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (Majampoh et al., 2018a). Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Faozan & Wahyuadianto, 2009). Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik (Bianchi & Peters, 2018). Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan dalam perbaikan organisasi OPD. Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur (Caperchione, Brusca, Cohen, & Rossi, 2016). Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara (Yusniyar, 2016). Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah yang baik pada semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur OPD sebagai media untuk mencapai Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan semua OPD yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa disepuluh kabupaten/kota yang ada di provinsi hanya dua kabupaten yang belum mencapai WTP. Sehingga dengan dicapainya pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, maka Organisasi Pemerintah Daerah dapat menjadi baik, karena Opini tersebut dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya, seperti dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan publik. Selain itu dapat memberi informasi tentang beban tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah daerah, serta dapat digunakan sebagai instrumen pemerintah agar dapat melindungi tugas dan tanggungjawab aparatur pemerintah daerah di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan Politeknik Negeri Samarinda, walaupun dana terbatas dalam hal Anggaran, namun tetap menyisihkan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kegiatan penelitian. Selain biaya penelitian juga dialokasikan juga untuk kegiatan seminar, yang dikelompokkan kedalam beberapa kelompok biaya, anantara lain adalah: (a) biaya pendaftaran seminra, (b) biaya buplikasi, (c) biaya transportasi pergi-pulang, (d) biaya penginapan di hotel, (e) biaya transportasi darat pergi-pulang. Kondisi ini dilakukan manajemen bukan Cuma penelitian, tetapi juga dilakukan hal yang sama dengan pengabdian kepada masyarakat, yang juga disediakan untuk seminar hasil penelitian yang akan dilakukan baik dalam wilayah Samarinda, maupun di luar wilayah Samarinda.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. Chaedar, A. (2011). Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Penerbit Pustaka Jaya, Bandung Jawa Barat Indonesia., v-284.
- [2] Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- [3] Astuti, S. (2018). Peran Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Instansi Instalasi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sidirman Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 17(1), 1-23.
- [4] Astuti, S. K. N. (2017). *Pelaksanaan Standar Prosedur Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan pada Kepolisian Sektor Kota Makassar.*,
- [5] Bianchi, C., & Peters, B. G. (2018). Measuring Coordination and Coherence: Assessing Performance Across the Public Sector. In *Outcome-Based Performance Management in the Public Sector* (pp. 143-159): Springer.
- [6] Caperchione, E., Brusca, I., Cohen, S., & Rossi, F. M. (2016). Innovations in public sector financial management. *Int. J. Public Sector Performance Management*, 2(4), 303.
- [7] Demak, I. N. K., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(02).
- [8] Dewi, N. P. (2012). Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. In: Jakarta.
- [9] Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- [10] Faozan, H., & Wahyuadianto, A. (2009). Mengarahkan Eksistensi Standard Operating Procedures pada Proses Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 5(3).
- [11] Hasiara, L. O. (2012). Metode Penelitian Multi Paradigma Satu, Membangun Reruntuhan Metode Penelitian yang Berserakan. Penerbit Darkah Media, Malang Jawa Timur. (1), x+172.
- [12] Hasiara, L. O. (2018). Penelitian Multi Kasus dan Multi Situs, Penerbit IRDH, Malang Jawa Timur -xxiint+276.
- [13] Istqobudi, I. S., Yama Fredian Dewi; dan Suharjono, Amin. (2015). Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Secara Realtime pada Pengembang Gabah Berbasis Wireless Sensor Network. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif, 2015.
- [14] Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P., & Afandi, D. (2018a). Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(04).
- [15] Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P., & Afandi, D. (2018b). Analisis Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(04).
- [16] Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2), 102-116.
- [17] Nenagara, P. A. B., dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia (2012). Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. In: Jakarta.
- [18] Oemar, Y. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Kerja Momitmen Organisasi terhadap OCB Pegawai BAPPEDA Kota Pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(1), 1-176.
- [19] Soeradi, D. S., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2018a). Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(03).
- [20] Soeradi, D. S., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2018b). Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(03).
- [21] Subadi, C. (2008). Metodologi penelitian: Kualitatif. In: UIN-Maliki Press.

- [22] Yee, C. S., Sujan, A., James, K., & Leung, J. K. (2017). Perceptions of Singaporean internal audit customers regarding the role and effectiveness of internal audit. *Asian Journal of Business and Accounting*, 1(2), 147-174.
- [23] Yusniyar, D. d. S. A. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh).